

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini pada dasarnya adalah payung hukum dibidang telekomunikasi, *computing* dan *entertainment* (media), dimana pada awalnya masing-masing masih berdiri sendiri-sendiri, undang-undang ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, agar pada saat kita bertransaksi elektronik seperti transaksi keuangan menggunakan ponsel/komputer, dari mulai saat memasukkan *password*, melakukan transaksi keuangan, sampai dengan transaksi selesai/tertuju, terdapat jaminan atas proses transaksinya tersebut.

Kepastian hukum ini diperlukan untuk semua warga Indonesia umumnya dan para pengguna jasa internet/jaringan pada khususnya, hal ini wajar mengingat tidak menutup kemungkinan didalamnya selain terdapat konten negatif juga terdapat kejahatan didalam *networking* (dalam menggunakan jaringan internet). Perasaan untuk memperoleh keadaan financial yang lebih tinggi kerap memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, sepanjang keinginan yang dilakukan ditempuh dengan jalan yang positif, pastinya sah-sah saja, yang tak wajar adalah jika keinginan tersebut dilakukan dengan berbagai cara termasuk juga cara-cara yang negatif yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-undang juga agama, misalnya "Perjudian". Adapun tindak pidana perjudian itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Menurut hukum Islam Judi ialah suatu permainan

atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya, masing-masing dari mereka ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan rugi). Sebagaimana Allah telah melarang perjudian ini, firman-Nya dalam al- Quran surah al-Maaidah ayat 90: ¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Harta yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang bathil (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bathil maka hukumnya haram, harta yang diperolehnya jika dipakai untuk usaha itu berarti menggunakan modal yang dilarang oleh agama Islam, meskipun hal tersebut (harta dari hasil judi) dipergunakan di jalan Allah sekalipun, akan tetapi Allah tidak akan menerimanya.

Perjudian di dalam *networking/internet* adalah merupakan konten yang perlu dicegah, ditutup, atau dihilangkan dari seluruh jaringan internet yang memasuki wilayah otoritas Indonesia, karena terdapat konten negatif di dalamnya. Di Indonesia, yang dimaksud dengan *konten negatif* di internet adalah yang mengandung perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang

¹ Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Huda. hlm. 124.

Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* yaitu tepatnya pada pasal 27 Ayat 1 (Kesusilaan), ayat 2 (Perjudian), ayat 3 (Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik), ayat 4 (Pemerasan dan atau Pengancaman) dan pasal 28 ayat 1 (Menyebarkan berita bohong), ayat 2 (SARA). khusus untuk asusila diambil pula pasal-pasal di dalam Undang-undang Anti Pornografi dan untuk kejahatan terhadap anak-anak digunakan Undang- undang Perlindungan Anak.

Saat ini teknologi internet memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dari kehidupan anak pada saat ini. Internet bisa mempermudah mereka menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi dampak negatif dari internet juga tidak kalah besarnya dan tidak bisa di anggap remeh, berhubung maraknya konten-konten negatif di internet, dibutuhkan peraturan atau pengawasan, sehingga mereka merasa diawasi ketika akan membuka situs-situs yang negatif. Hukum yang diterapkan acap kali hanya sebagai permainan para mafia-mafia di area perjudian, seakan mereka kebal terhadap hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Bagaimana tidak? sering mereka ditahan namun beberapa hari kemudian sudah duduk di meja judi kembali, tanpa melalui pemeriksaan yang cukup layaknya pelaku pidana perjudian.

Perjudian bisa dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk penggunaan akses internet. Internet yang dikenal sebagai sebuah tempat untuk mencari data- data dalam memenuhi kebutuhan akan kehausan ilmu pengetahuan ternyata kini telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Steven Hawking sebagaimana telah dikutip oleh Mahayani

Dimitri, internet merupakan *big bang* kedua didunia, ditandai dengan adanya komunikasi *elektromagnetropis* via satelit maupun kabel oleh eksistensi jaringan telepon yang sudah ada dan akan segera didukung oleh ratusan satelit yang sedang dan akan diluncurkan.

Para pihak yang tidak bertanggung jawab, menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh rezeki meskipun lewat jalan yang tidak halal, yaitu mereka membuat sebuah *website* (sebuah alamat pada internet untuk memudahkan diakses) dimana didalamnya terdapat *home page* (halaman utama sebuah website yang memuat informasi singkat tentang isi dari *website*).²

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum positif di Indonesia, dan ini pun sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan tindak pidana.

Di Indonesia perjudian lewat internet ini ternyata memang sudah ada, salah satunya perjudian bola *online* berdasarkan putusan perkara Nomor: 617/Pid.B/2010/PN.MLG, adapun kronologi kasus nya adalah sebagai berikut: Terdakwa Nama ARYANADA Als. SAK FUI lahir di Pemangkat, 29 April 1957 Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, agama: Katolik Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl.Ade Irma Suryani No.7 Kota Malang.³

Terpidana didakwa dengan dua dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan tersebut, terpidana terbukti dalam dakwaan

² Internet. www.wikipediaindonesia/sejarah-internet, diakses pada tanggal 12-09-2013

³ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 617/Pid.B/2010/Pn.Mlg. hlm. 1

pertama: Terdakwa ARYANADA als. SAK FUI bersalah melakukan tindak pidana perjudian tanpa hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP jo. UU RI No.7 Tahun 1974. Terdakwa dituntut pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.

Menimbang, bahwa dalam hal memilih dakwaan untuk dipertimbangkan tersebut, majelis Hakim akan berpedoman pada fakta persidangan dimana dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu untuk dipertimbangkan, karena dakwaan pertama paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang, bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum didasarkan pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU RI No.7 tahun 1974, dimana terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi.

Berdasarkan segala pertimbangan hakim maka terdakwa ARYANADA Alias SAK FUI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Hal di atas menunjukan bahwa semakin berkembangnya teknologi, membuat para penjudi mempunyai seribu cara untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa harus duduk bersama-sama para penjudi lainnya,

namun cukup dengan duduk didepan komputer dan menggunakan internet mereka sudah bisa melakukan judi, bahkan jaringannya sampai keluar negeri. Hal ini jika dibiarkan terus menerus dan tidak ada hukum yang pasti untuk menjerat tindakan pidana ini, maka hal tersebut menjadi seolah melegalkan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan elektronik atau “Perjudian Elektronik” terutama perjudian bola *online*.

Melihat pentingnya hukum untuk dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan *Informasi dan Transaksi Elektronik*, pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang disahkan pada tahun 2008, dimana pada salah satu pasal, yaitu pasal 27 ayat 2 berbunyi:⁴

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Perjudian elektronik dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No 11 tahun 2008, adalah sebagai perbuatan yang dilarang, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sebagaimana yang telah diundangkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 27 Ayat 2 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hlm. 14

B. Rumusan Masalah

Sanksi perjudian bola online di Indonesia dinilai masih kurang tegas karena sanksinya yang terdapat dalam putusan PN.Malang No.617 terlalu ringan yang menyebabkan perbuatan ini masih merajalela di masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap perjudian bola Online dalam putusan No.617/Pid.B/2010/PN.Malang menurut hukum pidana Islam
2. Bagaimana sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online dalam putusan No.617/Pid.B/2010/PN.Malang menurut Hukum Pidana Islam

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim terhadap perjudian bola online dalam putusan No.617/Pid.B/2010/PN.Malang
2. Untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online dalam putusan No.617/Pid.B/2010/PN.Malang menurut Hukum Pidana Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa Hukum Pidana Islam, Dosen, dan pemerhati Ilmu Hukum Pidana Islam dalam melakukan penelitian maupun dalam

menulis karya-karya ilmiah lain nya sebagai referensi guna perkembangan kajian Hukum Pidana Islam.

- 2) Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para praktis Hukum dan Hakim di pengadilan dalam menerapkan nilai nilai Hukum Pidana Islam dalam suatu keputusan Hukum guna tegak nya hukum Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Penyusun memulai penelitian ini mengutip dalil, bahwasannya Alloh swt befirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu

Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.⁵

Diriwayatkan Rasyid Ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan *khamar* dan judi.⁶

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan *khamar* dan *maisir* adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena *madharatnya* lebih banyak dibandingkan manfaat dari perbuatan tersebut. Dalam sebuah Hadits dikatakan :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْجَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ مَنْ
لَعِبَ بِالْأَثَرِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه و أحمد و مالك و أبو داود و
ابن ماجه قل الألباني :
(حسن)

Artinya: Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rosulluloh SAW bersabda, barang siapa yang bermain judi, maka sesungguhnya ia telah

⁵ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-Azim, Terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 30-31.

⁶ Ibid., h. 31.

mendurhakai Allah dan Rosulnya. (HR.Ahmad,Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Albani berkata Hasan)

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Dalam Kaidah fiqh dikatakan :

لِكُلِّ عَمَلٍ مُّكَلَّفٍ دَرَجَاتٌ ۖ لِّمَا عَمِلَ مِنْهُ ۖ لِيَجْزِيَ ۖ أَتَمًّا ۖ أَوْ غَيْرَ أَتَمٍّ ۚ

“Setiap perbuatan maksiat yang tidak di kenai sanksi had atau kaffarat adalah jarimah ta’zir”

Kaidah pertama di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan *mukallaf* (orang yang dibebani hukum/subjek hukum) tidak dapat disebut terlarang (haram) dan harus dikenai hukuman sebelum adanya nash yang menerangkan keharamannya sehingga ia bisa melakukan apapun baik melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan sampai adanya nash yang melarangnya. Hal ini ditegaskan pula oleh kaidah berikutnya bahwa asalnya sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada aturan yang melarangnya

Penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian yang didukung oleh teori penjatuhan sanksi, dalam penjatuhan sanksi mengenai hukum pidana dikenal beberapa teori pembedaan yang menjadi dasar atau acuan adanya sanksi atau penjatuhan sanksi, teori tersebut yaitu :

1. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada

perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.

2. Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.
3. Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.
4. Teori treatment, mengemukakan bahwa pidana sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.
5. Teori perlindungan sosial (social defence) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica,

tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Untuk mempermudah penelitian, maka penulis harus memahami makna dari istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian itu sendiri maupun istilah-istilah lain yang digunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu agar lebih jelas penulis menguraikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:



F. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *Library Research* (studi kepustakaan), yaitu dengan cara memperoleh dan mengumpulkan bahan-bahan hukum serta mengkaji, mempelajari, meninjau dan menganalisis bahan-bahan hukum dari literatur yang berhubungan dengan masalah hukum yang dibahas.⁶

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya. Adapun sumber data yang digunakan menurut Zainuddin Ali terdiri dari dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder

c. Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan seperti: skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier:
 - c. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer UU No 7 Tahun 1974 tentang perjudian, UU ITE No 11 Tahun 2008 tendalam penelitian ini seperti: Al-Quran, Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, tang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, KUHAP, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 617/Pid.B/2010/PN.MLG sebagai objek penelitian. Bahan hukum sekunder menurut Soekanto, yaitu bahan yang
-

berfungsi sebagai pendukung bahan primer dan sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer yaitu berupa tafsir Al-Quran, terjemah, buku-buku hukum dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.⁸ Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Arab, paper, koran, ensiklopedia, internet dan bahan-bahan yang lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menurut Zainuddin Ali, terdiri dari 3 macam yaitu:

- i. *Observasi*, yaitu mengamati lapangan yang dijadikan sebagai objek penelitian.
- ii. *Interview* (wawancara), yaitu mencari informasi dan pendapat-pendapat dari responden di lapangan dengan menentukan populasi dan sampel penelitian.
- iii. *Kepustakaan*, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan cara membaca Al-Quran dan kitab hadits, peraturan perundang-undangan, KUHP, KUHAP, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 617/Pid.B/2010/PN.MLG adalah sebagai objek penelitian, litelatur-litelatur atau buku-buku, karya ilmiah, internet dan sebagainya.

e. Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara deskriptif- analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik simpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah.

